

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR  
KABUPATEN/KOTA  
DI SUMATERA BARAT DAN KEBIJAKAN PENANGGULANNYA**

**Oleh: Bakri, Syafrizal, Hasdi Aimon**

---

*Abstract*

*This study aims to analyze and determine the effect of: (1) economic growth for development inequality between districts / cities in West Sumatra, (2) investment towards development gaps between districts / cities in West Sumatra, (3) labor for development inequality between counties / town in West Sumatra and (4) fund balance to inequality of development between districts / cities in West Sumatra. This type of research is descriptive and associative. While this type of data is data documentary, source of data is secondary data as well as data-shaped panel (combined data time series and cross-section). This research use analysis tool with Ordinary Least Squared (OLS). The study concluded that (1) Economic growth significant and positive impact on the inequality of development of West Sumatra province. (2) Investment inequality affects development of West Sumatra province significantly and positively. (3) Workers not significant impact on the inequality of development of West Sumatra province. (4) The fund balance inequality influence the development of West Sumatra province significantly and positively. Based on these results the policies that can be suggested is to increase government spending on productive expenditure such as construction of a strategic business region in order to increase the amount of capital investment as development.*

*Keyword : development inequality, economic growth, invesment, labor, fund balance*

**A. Pendahuluan**

Ketidakseimbangan dalam pem-bangunan ekonomi suatu daerah biasanya terjadi kalau hanya diserahkan kepada kekuatan-kekuatan mekanisme pasar. Perkembangan ekonomi daerah yang diserahkan pada kekuatan-kekuatan mekanisme pasar cenderung memperbesar ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Sebab dalam kenyataan, kegiatan dan perkembangan ekonomi lebih sering terjadi dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja. Sebaliknya, pada wilayah lain yang nampak terjadi hanyalah semakin ketertinggalan saja.

Pesatnya perkembangan ekonomi suatu wilayah akan kurang menguntungkan untuk wilayah-wilayah lainnya karena terjadi ketertarikan sumberdaya. Realitanya, tenaga kerja, modal, perdagangan akan mengalir pada wilayah-wilayah yang berkembang lebih cepat. Sebagai contoh, tenaga kerja produktif dan profesional akan bermigrasi ke wilayah-wilayah yang kegiatan ekonominya berkembang cepat. Mengalirnya sumberdaya-sumberdaya pada wilayah yang ekonominya berkembang pesat memperlambat berkembangnya wilayah-wilayah lain yang kehilangan sumberdaya seperti tenaga kerja, sumberdaya alam, dan modal.

Salah satu provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ini adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang sedang melakukan pembangunan diberbagai sektor di dalam perekonomiannya saat ini.

Ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat dapat dilihat berdasarkan suatu indikator atau suatu indeks ketimpangan pembangunan yang salah satunya adalah indeks Williamson. Tabel 1 menunjukkan perkembangan indeks Williamson di Sumatera Barat dari tahun 2005-2012 serta faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya.

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2005 – tahun 2009, ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat berdasarkan indeks Williamson tersebut turun akan tetapi meningkat dari tahun 2010 – tahun 2014. Peningkatan ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat ini diduga dikarenakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja dan dana perimbangan. Peningkatan ketimpangan pembangunan pada tahun 2010 - 2014 ini diduga oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja dan dana perimbangan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2010 - 2014 pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja dan dana perimbangan memang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa ketimpangan pembangunan antara kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode penelitian dapat dikatakan secara umum mengalami peningkatan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi ini diduga akibat dari lemahnya atau kurang mampunya strategi yang dilakukan selama ini untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Untuk itu perlu strategi yang pas dan cocok untuk mengatasi ketimpangan pembangunan sehingga ketimpangan ini benar-benar bisa dikurangi.

**Tabel 1 : Perkembangan Indeks Williamson, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Dana Perimbangan di Sumatera Barat dari Tahun 2005 – 2014**

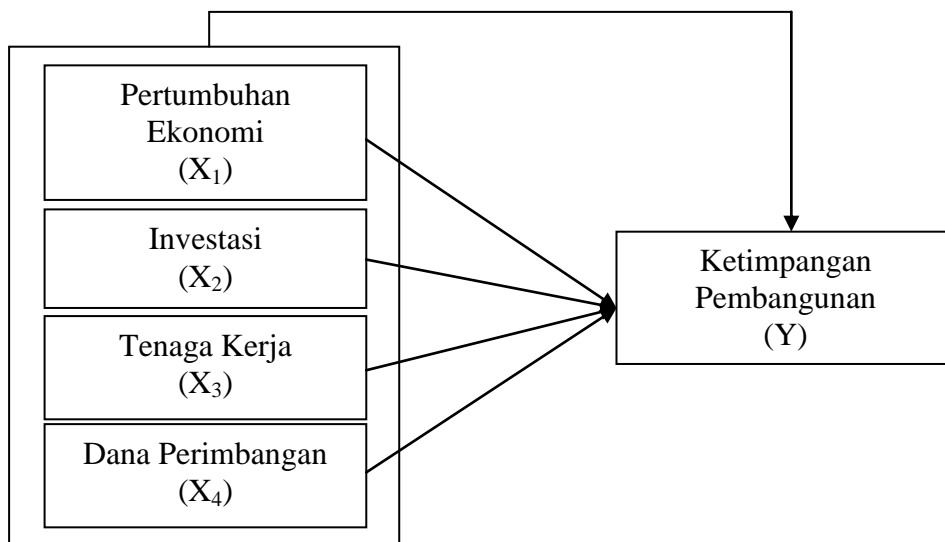
Tahun	Indeks Williamson	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Investasi (Juta Rupiah)	Tenaga Kerja (Orang)	Dana Perimbangan (Juta Rupiah)
2005	0,40	5,73	5.388.134	1.717.289	310.059,97
2006	0,39	6,14	5.604.646	1.808.275	536.517,12
2007	0,38	6,34	5.824.273	1.889.406	603.373,00
2008	0,38	6,88	6.131.890	1.956.378	742.743,87
2009	0,38	4,28	6.435.873	1.998.922	786.622,94
2010	0,41	5,93	7.161.096	2.041.454	769.696,97
2011	0,41	6,22	7.935.708	2.070.725	931.882,62
2012	0,41	6,39	8.504.652	2.037.642	1.143.895,85
2013	0,41	6,21	9.141.055	2.005.625	1.928.371,22
2014	0,41	7,63	9.473.812	2.058.492	2.182.912,12

Sumber : Badan Pusat Statistik dan DPKD Sumatera Barat

## B. Metode Penelitian

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten / kota di Sumatera Barat pada penelitian ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja dan dana perimbangan. Apabila pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja dan dana perimbangan tidak merata antara satu daerah dengan daerah lain, maka keadaan ini akan mendorong terjadinya kenaikan ketimpangan pembangunan antar kabupaten / kota di Sumatera Barat.

Untuk melihat hubungan diantara berbagai variabel di atas, dapat diperlihatkan dalam bentuk kerangka konseptual di bawah ini.



**Gambar : Kerangka Konseptual**

**C. Model Analisis**

Seperti yang dinyatakan dalam kajian teori, bahwa persamaan ketimpangan pembangunan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja dan dana perimbangan. Dimana bentuk persamaan fungsionalnya adalah sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4)..... (1)$$

Dalam ekonometrika, bentuk persamaan ketimpangan pembangunan di atas adalah berbentuk persamaan fungsional. Apabila dijadikan dalam bentuk persamaan struktur, bentuk fungsi tersebut menjadi sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu ..... (2)$$

dimana :

- Y = ketimpangan pembangunan
- X<sub>1</sub> = pertumbuhan ekonomi
- X<sub>2</sub> = investasi
- X<sub>3</sub> = tenaga kerja
- X<sub>4</sub> = dana perimbangan
- β<sub>0</sub> = konstanta
- β<sub>1</sub> = koefisien estimasi pertumbuhan ekonomi

- $\beta_2$  = koefisien estimasi investasi
- $\beta_3$  = koefisien estimasi tenaga kerja
- $\beta_4$  = koefisien estimasi dana  
perimbangan
- $u$  = *error term*

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Uji Multikolinearitas

Dari hasil uji multikolinearitas dengan metode *Variance Inflation Factor* (VIF), didapatkan nilai VIF seluruh variabel (G, T, Ms dan i)  $< 5$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model ini tidak terjadi persoalan multikolinearitas. Dengan arti kata pada penelitian ini tidak terdapat hubungan antara sesama variabel bebas (*independent*).

### 2. Uji Heterokedastisitas

Dari hasil uji Heterokedastisitas dengan Uji Park, dapat diketahui seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (2.57058). Nilai  $t_{tabel}$  dicari pada  $\alpha = 0,05 : 2 = 0,025$  (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-4$  atau  $9-4 = 5$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2.57058. Oleh karena seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Dengan demikian seluruh variabel pada penelitian ini memiliki hubungan linear dengan residual (variabel diluar model).

### 3. Uji Autokorelasi

Berdasarkan uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), nilai DW adalah 2,195764. Sedangkan dari Tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data ( $n$ ) = 52, serta  $k = 4$  ( $k$ =jumlah variabel bebas) diperoleh nilai  $dL = 1,38$ ,  $dU = 1,72$ ,  $4-dU = 2,28$ ,  $4-dL = 2,62$ . Karena nilai DW adalah 2,195764 berada pada daerah antara  $dU$  dan  $4-dU$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Dengan arti kata pada penelitian ini tidak terdapat korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain.

#### 4. Hasil Estimasi Model Regresi Berganda

Dari hasil estimasi yang telah dilakukan didapat model persamaan ketimpangan pembangunan antar kabupaten / kota di Sumatera Barat sebagai berikut :

$$Y = 0.216760 + 0.377842 X_1 + 0.436823 X_2 \\ (4.965344) (3.129187) (3.346145) \\ + 0.488053 X_3 + 0.649814 X_4 \dots (3) \\ (1.600067) (3.946193)$$

$$R^2 = 0.751191 \\ F\text{-statistic} = 32.45589$$

Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dengan nilai nilai  $t_{hitung}$  pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan  $> t_{tabel}$  ( $3,129187 > 2,57058$ ). Dengan arti kata bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi, hal ini terjadi karena pada awal - awal pembangunan pelaku ekonomi suka berinvestasi pada daerah - daerah yang relatif maju sebab infrastruktur lengkap, banyak tenaga kerja yang terlatih, peluang bisnis tersedia sehingga daerah yang tadinya juga sudah maju akan semakin maju dan keadaan ini akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi daerah maju. Daerah - daerah yang relatif tertinggal akan semakin ketinggalan sebab daerah tersebut memiliki banyak keterbatasan seperti tenaga kerja terdidik dan terlatih tidak tersedia, infrastruktur biasanya tidak memadai sehingga daerah ini akan semakin tertinggal. Oleh sebab itu, ketimpangan pembangunan akan semakin lebar. Jika tidak dibangun berbagai fasilitas dan faktor pendukung perekonomian di daerah tertinggal maka ketimpangan pembangunan akan tidak terhindarkan dan bahkan bisa menjadi semakin melebar.

Investasi mempengaruhi ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara signifikan dan positif. Hal ini terlihat dari nilai  $t_{hitung}$  investasi terhadap ketimpangan pembangunan  $> t_{tabel}$  ( $3.346145 > 2,57058$ ). Kondisi ini mengartikan bahwa peningkatan investasi yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan investasi dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya investasi yang terjadi. Hal ini akan mendorong tidak seimbang pembangunan yang terjadi. Apabila hal ini terus dibiarkan maka ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah terutama pada kabupaten / kota di Sumatera Barat akan semakin melebar.

Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari nilai  $t_{hitung}$  tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan  $< t_{tabel}$  ( $1.600067 < 2,57058$ ). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada daerah yang tenaga kerjanya relatif lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain, keadaan ini tidak akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antar daerah di Sumatera Barat. Kondisi ini dikarenakan masih banyaknya tenaga kerja yang belum tercatat seperti tenaga kerja yang bekerja di sektor informal. Sulitnya melacak keberadaan sektor informal sehingga sulit pula untuk menghitung berapa besar tenaga kerja yang diserap oleh sektor ini. Oleh karena itu, keadaan ini tidak mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar daerah yang terjadi di Sumatera Barat.

Dana perimbangan mempengaruhi ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara signifikan dan negatif. Hal ini terlihat dari nilai  $t_{hitung}$  dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan  $> t_{tabel}$  ( $3.946193 > 2,57058$ ). Keadaan ini dikarenakan semakin banyak alokasi dana perimbangan untuk suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain maka alokasi fiskal pada daerah tersebut akan semakin tinggi sehingga daerah tersebut akan bisa lebih leluasa dalam menggunakan anggarannya untuk berbelanja. Alokasi belanja pemerintah yang cukup ini akan mendorong pertumbuhan pada daerah tersebut melalui peningkatan produksi

barang dan jasa. Dengan demikian, daerah dengan alokasi dana perimbangan yang memadai akan dapat meningkatkan pertumbuhan daerah tersebut sedangkan daerah yang tidak memiliki alokasi dana perimbangan yang memadai akan dapat memperlambat pertumbuhan daerah tersebut sehingga kondisi ini akan dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan.

## **E. Penutup**

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. (2) Investasi mempengaruhi ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara signifikan dan positif. (3) Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. (4) dana perimbangan mempengaruhi ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara signifikan dan positif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kebijakan-kebijakan yang dapat disarankan adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah pada pengeluaran produktif seperti pembangunan kawasan usaha yang strategis guna meningkatkan jumlah investasi sebagai modal pembangunan. Dengan kebijakan ini investor akan tertarik menanamkan modalnya di daerah terutama pada daerah-daerah yang masih sedikit tersentuh investasi. Pemerintah daerah terutama pemerintah provinsi berusaha mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat terutama pada kabupaten/kota yang investasinya masih kurang. Adanya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan ketimpangan distribusi pendapatan maka pemerintah diharapkan mampu memfokuskan sasaran kebijakan yang tepat yakni memacu pertumbuhan dengan memperhatikan distribusi pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas akses modal dan kesempatan kerja (mendorong meningkatnya sektor riil yang berorientasi masyarakat menengah kebawah seperti UMKM) yang dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.



## **F. Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik. (2002-2013). *Sumatera Barat Dalam Angka*. Jakarta : BPS.
- Irawan dan Suparmoko. (2002). *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFPE.
- Jhinghan. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. (2002). *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Sjafrizal. (2009). *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Jakarta : Baduose Media.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Subri, Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Robinson. (2004). *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.